



ပိဗ်ၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိၵ်ႈသိၵ်ႈၵိၵ်ႉသိၵ်ႈသိၵ်ႈ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

တၢ်သိၵ်ႈသိၵ်ႈၵိၵ်ႈသိၵ်ႈသိၵ်ႈ (ပိၵ်ႉတၢ်)

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)

ၵၢၵ်ႈၵိၵ်ႈသိၵ်ႈ (၀ၳၵၢၵ်ႈ) ၵၢၵ်ႈၵိၵ်ႈ

TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: diskelkan@baliprov.go.id

Bali, 21 Pebruari 2025

- Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi
Bali
2. Kepala Biro Orgnisasi Setda
Provinsi Bali
di –
Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.26.500.5/577/Sekret/Diskelkan

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024	1 (satu) gabung	Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor B.39.000.8.6.3/2758/RBAK/B.ORG Hal : Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran surat ini. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE






LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI TAHUN 2024



Jl. Patimura 77 Dangin Puri Kangin Denpasar Utara

 dislautkan@baliprov.go.id



@bali



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BANGSA
BERWISATA
INDONESIA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip Money Follow Function diubah menjadi Money Follow Program serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).



1.2 Struktur Organisasi & Tata Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di bentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Kelautan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
- 4) Bidang Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya; dan
 - c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- 6) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
 - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 7) Jabatan Fungsional; dan
- 8) UPTD
 - a. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD PPMHP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD PPMHP terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :



- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - iii. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut merupakan unsur pelaksana kegiatan pembenihan berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
 - iii. Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali merupakan unsur pelaksana teknis berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Seksi Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
 - iii. Seksi Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - iv. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Pelabuhan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis program Dinas kelautan dan Perikanan



Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri dari :
Kepala UPTD, membawahi :

- i. Sub Bagian Tata Usaha;
- ii. Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
- iii. Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha; dan
- iv. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam tahun 2023 termasuk pegawai UPTD sebanyak 179 orang terdiri dari:

1) Jumlah Pegawai

Jenis Pegawai	Jumlah (Orang)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	97
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	23
Tenaga Kontrak	59

2) Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Setrata 2 (S2)	25
2	Setrata 1 (S1)	78
3	Sarjana Muda (D/I), (D/II),(D/III), (D/IV)	30
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	31
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	2
6	Sekolah Dasar (SD)	3
Jumlah		179

3) Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	8
3	Pembina (IV/a)	9
4	Penata Tingkat I (III/d)	20



5	Penata (III/c)	9
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
7	Penata Muda (III/a)	21
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	6
9	Pengatur (II/c)	3
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
11	Pengatur Muda (II/a)	1
12	PPPK Gol VII	7
13	PPPK Gol IX	15
14	PPPK Gol XI	1
Jumlah		120

4) Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	13
4	Fungsional Madya	8
5	Fungsional Muda	9
6	Fungsional Pertama	1
7	Staf PNS (Pelaksana)	58
8	PPPK	23
Jumlah		120

1.4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumber daya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (Renewable resources), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (Non renewable resources), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-



jasa lingkungan kelautan (Environmental services). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah;
- 2) Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah;
- 3) Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur
- 4) Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- 5) Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi;
- 6) Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan-kecil Dan Pengrajin Garam Belum Optimal;
- 7) Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal;
- 8) Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah;
- 9) Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah;
- 10) Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- 11) Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah;
- 12) Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata;
- 13) Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah;
- 14) Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal;
- 15) Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah;



- 16) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah.

Adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB;
- 3) Belum optimalnya tingkat konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan;
- 4) Belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 5) Belum optimalnya kesejahteraan nelayan;

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 9) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
 - 10) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
 - 11) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Kelautan mengemban Tujuan ke-1 Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu: “Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”. Kemudian pada sasaran Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di jadikan tujuan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
	2.	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	2.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan
	2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya secara detail Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan di tampilkan pada tabel berikut:



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	FORMULASI
					KONDISI AWAL RENSTR A TAHUN 2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,47	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
		Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB *	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10%	5,79%	6,02%	6,25%	6,25%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%	18%	= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		Angka inflasi	Persen	3±1	3±1	3±1	3±1	3±2	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
		Meningkatnya kesejahteraan Nelayan *	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45%	100,22 %	100,25 %	100,28 %	100,28%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik



Dokumen ini telah dilandatanganinya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%	6%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
--	---	--	--------	----	----	----	----	----	---



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja, menciptakan tolak ukur kinerja, memfasilitasi manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian ini berisi program, kegiatan, dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Bali:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manakjemen Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Nilai
2	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	5,79 %
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6 %
4	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22 %
5	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha	2 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 27,303,626,747.00	PAD
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 1,250,324,000.00	PAD, DAK
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 609,810,120.00	PAD
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2,361,359,010.00	PAD, DAK
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 713,278,940.00	PAD, DAK
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 970,410,101.00	PAD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali jika dibandingkan antara capaian pada tahun 2023 dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	126.630,66 ton	139.595,58 ton	110.24 %	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	28.166,57 ton	21.670,68 ton	76.94 %	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	5 Kawasan	5 Kawasan	100%	N/A	N/A	N/A
4	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	5,79 %	4,41 %	76,17 %
5	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	N/A	N/A	N/A	6%	4%	66,67 %
6	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	N/A	N/A	N/A	100,22%	91,97%	90,00%
7	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	2%	4,2%	210%



Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali. Dengan berakhirnya periode kepemimpinan Gubernur tahun 2018-2023 maka pada tahun 2024 sasara mengacu pada RPD tahun 2024-2026 dimana terdapat perbedaan Sasaran seperti pada tabel di atas. Terdapat 4 sasaran yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Terdapat satu indikator yang capaian realisasinya melampaui 100%, sedangkan tiga indikator lainnya belum mencapai 100%. Capaian realisasi kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB sebesar 76,17 %. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. PDRB merupakan indikator utama dalam pembangunan daerah. Manfaat PDRB salah satunya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan sangat perlu ditingkatkan dari segi jumlah produksi maupun harga agar dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB lebih maksimal lagi. Capaian realisasi persentase pemanfaatan ruang laut sebesar 66,67 % dimana masih terdapat 2 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum selesai proses penetapan yaitu KKP Jembrana dan KKP Bali Selatan. Dan Capaian realisasi Nilai Tukar Nelayan sebesar 90% dimana seharusnya NTN adalah >100% yang artinya perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar nelayan sehingga nelayan harus menggunakan sumberdaya dari bidang usaha lain untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk mengamati capaian selama 5 tahun kebelakang dari sasaran di atas dapat diamati pada tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Sentra Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	121.713,44 Ton	124.147,71 ton	126.630,66 ton	N/A	0	120.798,50 ton	130.577,13 ton	139.595,58 ton	N/A
Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	0	25.516,85 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton	N/A	0	26.825,305 ton	27.151,635 ton	21.670,686 ton	N/A
Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	N/A	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	N/A
Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	N/A	5,79 %	N/A	N/A	N/A	N/A	4,41 %



Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	6%	N/A	N/A	N/A	N/A	4%
Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,22%	N/A	N/A	N/A	N/A	91,97%
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	N/A	N/A	N/A	N/A	4,2%

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	4,41 %	76,17 %	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan produksi seperti melakukan peningkatan jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh UPTD P2B, meningkatkan tingkat konsumsi ikan
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67 %	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah menyusun penetapan KKP Jembrana dan KKP Bali Selatan yang masih sedang berproses
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22 %	91,97%	90,00%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan alat tangkap dan rumpon untuk peningkatan produksi nelayan
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	2%	4,2%	210%	Pencapaian realisasi telah melampaui target	Sudah dilaksanakan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan



Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun tidak semua realisasinya mencapai 100%. Permasalahan yang terjadi juga dapat ditangani sepertipada solusi yang dijelaskan pada tabel di atas. Sedangkan untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

No	Tujuan/ Saaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	5,79%	4,41 %	76,17 %	3,331,769,111.00	2,983,325,601.00	89,54	10,46
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6%	4%	66,67 %	1,250,324,000.00	1,110,012,300.00	88,78	11,22
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,22 %	91,97%	90,00%	609,810,120.00	575,279,310.00	94,33	5,77
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2%	4,2%	210%	713,278,940.00	544,816,716.00	76,38	33,62

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran rata-rata 76% sampai 95%. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	76,17 % 24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	100	Menunjang
					Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	101,6	Menunjang
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	100	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
				di Laut	Ikan di Laut		
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	100	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	300.8	Menunjang
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	100	Menunjang
					Tingkat Konsumsi Ikan	203.6	Menunjang
					Persentase Peningkatan Daya Saing	100	Menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
					Produk Hasil Perikanan		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	152	Menunjang
					Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	160.4	Menunjang
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	152	Menunjang
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	283.3	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
					Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100	Menunjang
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	66,67 %	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	88.78%	Menunjang
					Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Menunjang
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90.37%	Menunjang
					Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan		Menunjang
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-	0.00 %	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
					K		
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	90.92%	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	86.49%	Menunjang
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	90,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	100	Menunjang
					Jumlah produksi perikanan tangkap	110.2	Menunjang
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25	Menunjang
				Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	64.9	Menunjang
				Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan BKP yang Diterbitkan	50	Menunjang
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	64.9	Menunjang
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	40	Menunjang
4	Terwujudnya kedaulatan dalam	Indeks Kepatuhan (compliance)	210%	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan	100	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
	pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	nce) Pelaku Usaha		PERIKANAN	Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	63.3	Menunjang
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	400	Menunjang
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS yang Terdaftar dan Aktif	105	Menunjang

Terdapat 5 (lima) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Indikator Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yang di hasilkan terdapat 2 (dua) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pada Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Laut terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap serta Pada Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Selain ketiga program di atas, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,987,785,114.00	18,966,480,223.00	90.37 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,987,785,114.00	18,966,480,223.00	90.37 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,193,233,000.00	962,227,859.00	80.64 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,005,000.00	17,130,000.00	81.55 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	703,343,200.00	558,516,210.00	79.41 %
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305,437,300.00	258,768,300.00	84.72 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,475,500.00	12,961,560.00	63.30 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142,972,000.00	114,851,789.00	80.33 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	433,643,300.00	365,991,000.00	84.40 %
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433,643,300.00	365,991,000.00	84.40 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377,754,905.00	309,505,812.00	81.93 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375,762,905.00	307,845,812.00	81.93 %
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,992,000.00	1,660,000.00	83.33 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,311,210,428.00	4,041,269,262.00	93.74 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	851,363,680.00	843,550,080.00	99.08 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,387,670,968.00	2,204,125,718.00	92.31 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533,800,000.00	530,661,934.00	99.41 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	521,085,780.00	447,946,530.00	85.96 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,290,000.00	14,985,000.00	86.67 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	736,092,200.00	665,238,050.00	90.37 %
		Penyusunan dan Penetapan	4,402,200.00	0.00	0.00%



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	731,690,000.00	665,238,050.00	90.92 %
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514,231,800.00	444,774,250.00	86.49 %
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514,231,800.00	444,774,250.00	86.49 %
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	544,310,920.00	531,876,170.00	97.72 %
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544,310,920.00	531,876,170.00	97.72 %
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00 %
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00 %
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	55,899,200.00	33,803,140.00	60.47 %
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	55,899,200.00	33,803,140.00	60.47 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	54,000,000.00	52,500,000.00	97.22 %
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45,240,000.00	44,790,000.00	99.01 %
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8,760,000.00	7,710,000.00	88.01 %
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2,307,359,010.00	2,118,462,681.00	91.81 %
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,423,299,391.00	1,349,088,711.00	94.79 %
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	884,059,619.00	769,373,970.00	87.03 %



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten/Kota			
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	713,278,940.00	544,816,716.00	76.38 %
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	218,576,140.00	118,866,716.00	54.38 %
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	494,702,800.00	425,950,000.00	86.10 %
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	970,410,101.00	812,362,920.00	83.71 %
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930,816,101.00	779,646,352.00	83.76 %
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39,594,000.00	32,716,568.00	82.63 %
Total			33,208,808,918.00	29,848,908,083.00	89.88 %

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang dilakukan efisiensi dan terdapat satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikarenakan tidak adanya penyedia untuk kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan Dokumen Kadaster karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat dan kualifikasi

1.2. Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2024 berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi anggaran:



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	27,303,626,747.00	24,645,474,156.00	90.26
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,250,324,000.00	1,110,012,300.00	88.78
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	609,810,120.00	575,279,310.00	94.34
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,361,359,010.00	2,170,962,681.00	91.94
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	713,278,940.00	544,816,716.00	76.38
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	970,410,101.00	812,362,920.00	83.71
Total		33,208,808,918.00	26,487,606,284.00	89.88

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung Program Dinas Kelautan dan Perikanan memprioritaskan anggaran untuk program prioritas sesuai dengan program yang menunjang Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran 89.88%.



BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah empat indikator. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali telah EFEKTIF dalam mencapai target yang telah diteapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali mencapai 89.88% dengan realisasi fisik mencapai 99.52%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 10.22% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2024 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukana atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa mendatang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pegawai dan pelaksanaan diklat yang berkelanjutan agar bisa terus update atas regulasi terkait kelautan dan perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 telah kami susun untuk dapat perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. [REDACTED]



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTU SUMARDIANA

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2024

Pihak Kedua



Pihak Pertama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Nilai
2	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	5,79 %
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6 %
4	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22 %
5	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha	2 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 26.409.982.152,00	PAD
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 1.376.733.520,00	PAD, DAK
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 481.614.400,00	PAD
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.306.859.069,00	PAD, DAK
5	Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan	Rp 562.144.940,00	PAD, DAK
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 643.780.651,00	PAD
Total Anggaran		Rp 31.781.114.732,00	

Pihak Kedua



Pihak Pertama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

